

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang manajemen komunikasi bencana yang dilakukan para peneliti terdahulu diantaranya oleh Puji Lestari, (2012) dengan judul Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengevaluasi manajemen komunikasi bencana gunung Merapi 2010 di DI. Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber, antara lain; pengurus dan anggota Forum Penanggulangan Resiko Bencana DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat, pendonor, relawan, dan semua yang terkait dengan manajemen penanggulangan bencana di Merapi. Hasil penelitian menunjukkan; manajemen komunikasi bencana di Merapi sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perencanaan sudah dilakukan dengan pembuatan Rencana Kontigensi. Pengorganisasian dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemda Sleman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Forum Penanggulan Resiko Bencana (FPRB). Pada pelaksanaan, ada koordinasi secara rutin pihak-pihak terkait seperti BNPB, FPRB, Pemda, bahkan berbagai media komunikasi di DIY. Proses evaluasi oleh BNPB, Pemda, dan FPRB berjalan rutin.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh S. Bekti Istiyanto, yang berjudul Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Program Pembangunan Kembali Daerah Dalam Program Pembangunan Kembali Daerah Wisata Pantai Pasca Bencana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data. Informan didapatkan dari para pengambil kebijakan di dinas-dinas terkait serta masyarakat yang mengalami musibah tersebut.

Hasil penelitian pertama, terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar atas sikap pemerintah daerah khususnya dalam pelibatan masyarakat dalam proses komunikasi pembangunan terkait dengan penyikapan menangani bencana yang melanda kawasan wisata pantai di daerahnya. Komunikasi Pembangunan Pemda Ciamis dalam menangani pemulihan lokasi wisata Pantai Pangandaran Ciamis telah berhasil menyusun program pemulihan ekonomi masyarakat dan melibatkan mereka dalam tahap perencanaan meskipun tidak terlibat lagi dalam tahap pelaksanaan dan evaluasinya, sangat berbeda dengan yang terjadi di lokasi wisata Pantai Widarapayung Cilacap dan Pantai Parang Tritis Bantul. Di Pantai Widarapayung sama sekali tidak terdapat program terpadu yang membuat lokasi wisata dan kehidupan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan karena tiadanya komunikasi yang terjadi antara pemda setempat atas program pembangunan yang jelas menjadikan kegiatan kepariwisataan di lokasi ini berjalan di tempat. Sementara program yang dilaksanakan pemda Bantul di Pantai Parang Tritis merupakan ide lama yang telah ada sebelum terjadi bencana. Namun kemudian dengan terjadinya bencana gempa

pembangunan relokasi kegiatan usaha bagi masyarakat seolah-olah mendapatkan pemicu dan momentum untuk melaksanakannya. Keberhasilan relokasi kegiatan usaha ini didukung adanya komunikasi pembangunan yang memadai dari pemda kepada masyarakat sekitar lokasi wisata.

Kedua tingkat partisipasi masyarakat dalam program komunikasi pembangunan yang terjadi sangat berbeda di tiga lokasi yang diteliti. Kesemuanya sangat tergantung dari inisiatif masing-masing pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi pembangunan terhadap masyarakatnya. Bila di Pantai Pangandaran, masyarakat dilibatkan di awal perencanaan program dan program yang disusun dilaksanakan oleh pemerintah. Maka sangat berbeda dengan yang terjadi di lokasi wisata Pantai Widarapayung. Karena tidak ada program pemulihan atau penataan ekonomi masyarakat kawasan pantai dari pemerintah daerah maka pelibatan partisipasi masyarakat menjadi mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah. Muncul kelompok mandiri masyarakat yaitu SIBAT yang peduli adanya bencana di kawasan wisata tempat mereka tinggal dan hidup serta berjalan tanpa proses komunikasi yang intens dengan pemerintah daerahnya. Sementara untuk masyarakat Pantai Parang Tritis sudah dalam tahap menerima karena program ini telah direncanakan pemda Bantul dua tahun sebelum dilaksanakan dan menjadi pemicu dengan terjadinya bencana gempa yang melanda Kabupaten Bantul dan sekitarnya.

Selanjutnya penelitian dari Puji Lestari, dkk tentang Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi manajemen komunikasi bencana di

Sinabung 2010, hambatan penanganan bencana, dan menemukan alternatif strategi manajemen komunikasi bencana khususnya saat tanggap darurat. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antarpihak terkait manajemen komunikasi bencana. Beberapa persoalan yang ditemukan mendorong perlunya penerapan sistem manajemen komunikasi bencana khususnya dalam keadaan tanggap darurat untuk dapat mengurangi resiko bencana.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Edwi Arief Sosiawan, Arif Rianto Budi Nugroho, dan Susilastuti, D.N. dengan judul Model Manajemen Teknologi Komunikasi Dalam Pemerintahan dan Penanganan Bencana Alam. Metode penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif yaitu membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Hasil dari penelitian menunjukkan manajemen TIK yang dilakukan oleh lembaga teknis yang mendukung sistem pemerintahan diantara subjek yang diteliti memang memiliki perbedaan dalam implementasinya. Perbedaan tersebut bersumber dari penerjemahan undang-undang serta peraturan di bawahnya yang berbeda-beda di antara subjek yang diteliti. Rekomendasi lembaga yang mengelola TIK untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana adalah dengan penambahan Bagian Urusan Teknologi di struktur organisasi BPBD, yang memiliki dua seksi yaitu Seksi Operasional Administrasi serta Seksi Operasional Lapangan.

Untuk penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh Dr. Eko Harry Susanto (2011) dengan judul Eksistensi Komunikasi dalam Menghadapi Bencana, Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Tarumanagara Jakarta. dengan hasil penelitian

untuk mengurangi tuduhan bahwa aparat pemerintah terlampaui lamban dalam mengantisipasi early warning system, maka selayaknya jika sistem informasi gempa, tsunami dan bencana lainnya, dapat diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan sejumlah fleksibilitas kebijakan penyebaran informasi yang memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintah yang terkait dengan masalah bencana, untuk bertindak tanpa khawatir terhadap tuduhan menyalahi prosedur yang telah ditetapkan. Sebab, tidak ada manfaatnya dalam situasi darurat, jika terus berpijak pada jalur komando yang birokratis. Padahal keterlambatan menyebarkan informasi ke berbagai pihak, akan berdampak pada hilangnya sejumlah nyawa manusia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas yang meneliti tentang bencana gempa, gunung berapi, bencana tsunami, penelitian ini meneliti tentang abrasi pantai yang semakin tahun semakin mengikis pesisir pantai dan semakin membahayakan keselamatan masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai dan bagaimana dalam hal ini pemerintah daerah melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Bantul DI. Yogyakarta menjalankan Manajemen Komunikasi Bencana untuk mregurangi resiko bencana abrasi di pantai selatan.

B. Dinamika Penanganan Bencana di Indonesia

Gempa bumi dahsyat berkekuatan 6,9 SR pernah mengguncang D.I Yogyakarta dan beberapa wilayah Jawa Tengah, tepatnya pada 27 Mei 2006 serta mengakibatkan dampak kerusakan dan korban yang sangat parah. Fenomena ini

bukan mustahil akan terulang kembali mengingat gempa bumi pada dasarnya mempunyai siklus perulangan gempa (earth quake cycle). Satu siklus biasanya berlangsung dalam kurun waktu puluhan sampai ratusan tahun (Natawijaya, 2004). Berkaca dari hal itu, maka sudah semestinya Pemda DIY membuat skenario mitigasi terhadap potensi ancaman gempa bumi sedini mungkin.

Dalam tulisan yang dimuat di koran Kedaulatan Rakyat oleh Sumarsih yang merupakan relawan gempa Yogya 2006 dan juga Staf Peneliti Alwi Research and Consulting (Arcon – Solo), dengan judul Memitigasi Ancaman Gempa Dangkal melalui Skenario Mitigasi. Dalam konteks mitigasi gempa bumi, ada dua faktor utama yang harus dipersiapkan secara matang dalam skenario mitigasi yang akan dirancang. *Pertama*, persiapan infrastruktur kota yang tahan gempa. Mafhum disadari, sebagai salah satu tujuan utama para wisatawan, DIY telah dibanjiri pelbagai enis bangunan, mulai dari pusat perbelanjaan, restoran hingga pelbagai jenis hotel. Mengutip data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) baik untuk restoran dan hotel terus bertambah. Per desember 2014 tercatat sudah lebih dari 104 permohonan pembangunan IMB telah diajukan untuk mendirikan hotel maupun restoran baru.

Pada titik ini, pemda DIY mesti mengambil peran untuk tidak semata-mata hanya menerbitkan IMB nya saja. Akan tetapi, perlu pula untuk mendorong agar pelbagai bangunan baru yang akan dibangun harus menggunakan konstruksi tahan gempa. Untuk itu, bisa diterbitkan peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub) yang mengatur keharusan pembangunan baru menggunakan

konstruksi tahan gempa.

Kedua, mendidik masyarakat sadar bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana. Itulah sebabnya, untuk membantu masyarakat mengaktualisasikan tanggungjawabnya dalam penanggulangan bencana, Pemda DIY perlu bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memberikan pendidikan sadar bencana kepada masyarakat secara rutin dan terus menerus.

Akhirnya , Pemda DIY, BPBD dan masyarakat harus bahu membahu untuk memitigasi potensi terjadinya gempa di DIY. Dengan begitu, dampak gempa maha dasyat yang menelan ribuan korban jiwa dapat dihindarkan.

Sementara itu dalam penanggulangan bencana letusan gunung Sinabung seperti yang disampaikan oleh Surono atau yang biasa dipanggil Mbah Rono selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dalam wawancara dengan majalah TEMPO menyebutkan telah terjadi kegagalan diplomasi oleh pemerintah daerah setempat. Padahal sebelumnya sudah masuk melakukan penyebaran informasi bencana melalui tempat ibadah seperti gereja dan mesjid. Namun pemerintah daerah masih lambat dalam menangani pengungsi dan komunikasi tidak jalan, sampai akhirnya terjadi incident commander yang dipegang oleh Komandan Korem Sibolga Kolonel Andika Perkasa dan koordinasi langsung ditangani oleh TNI, padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tidak ada peran TNI. Dalam hal ini

membenarkan pertanyaan dari pewawancara bahwa dalam menghadapi bencana semua resources memang harus digunakan dan bencana menjadi tanggung jawab bersama.

Menurut Nurjanah dkk (2013, 118-120) ada beberapa isu atau permasalahan yang muncul dalam manajemen bencana di Indonesia, khususnya yang terjadi pada saat tanggap darurat yaitu:

a. Sikap saling menyalahkan

Pada setiap kali terjadi bencana atau kedaruratan sering terdapat sikap saling menyalahkan atau bahkan saling lempar tanggungjawab. Yang mana hal ini malah menambah masalah. Dalam kondisi darurat, pada umumnya banyak pihak panik jika ditambah dengan cacian dan cemoohan atau kritikan miring, hal tersebut dapat berakibat situasi semakin tidak kondusif. Semua pihak seleyaknya bersatu padu dan saling mengisi kekurangan-kekurangan yang ada agar semua potensi/sumberdaya dapat bekerja secara maksimal.

b. Masalah Koordinasi

Masalah koordinasi selalu muncul dalam setiap kali terjadi bencana. Meskipun sudah ada cluster-cluster atau sektor-sektor yang menangani kedaruratan, pelaksanaan di lapangan selalu muncul kesimpangsiuran. Koordinasi lintas sektor/pelaku harus dilakukan sehingga lapisan paling bawah yaitu di titik-titik lokasi penanganan korban bencana/pengungsi. Banyaknya organisasi yang terlibat menjadikan kesulitan dalam pengaturan dan pembagian peran dari

masing-masing pelaku. Namun sebaliknya, banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan kedaruratan sebenarnya sangat positif karena dapat membantu meringankan beban penderitaan korban bencana dengan adanya sumberdaya yang lebih banyak/besar.

c. Masalah Komunikasi dan Informasi

Masalah ini berkaitan dengan komunikasi, pengembangan sistem komunikasi dan informasi bencana/kedaruratan, pengembangan sisten jaringan komunikasi dan informasi, serta perlunya informasi yang kredibel dan trus. Sistem informasi sangat dibutuhkan khususnya selama darurat. Data/informasi dari semua kegiatan harus tersedia. Lebih-lebih pada saat-saat awal setelah erjadi bencana, data dan informasi mutlak diperlukan secara cepat dan akurat untuk kemudian ditindak lanjuti dalam penanggulangan kedaruratan.

d. Masalah Distribusi Bantuan Darurat

Masalah ini utamanya terjadi pada prosedur pemberian bantuan dari posko ke titik-titik lokasi pengungsian. Prosedur yang berbelit-belit dan sangat formal selalu menghambat bantuan sampai ketangan korban bencana. Penanganan bencana menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat hanya karena prosedur formal yang rumit. Prosedur tersebut sebenarnya dapat disederhanakan tanpa menyalahi aturan main atau melanggar hukum. Posko yang menangani bencana harus menciptakan prosedr dengan cara-cara sederhana dan cepat.

e. Penanganan Kelompok Rentan dan Isu Gender

Permasalahan lain yang sering muncul dalam kedaruratan adalah masalah kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak khususnya balita, manusia lanjut usia, orang yang sedang sakit, dll). Dan pemenuhan kebutuhan wanita dan masalah gender.

f. Masalah Sosial Ekonomi

Pada saat darurat yaitu selama dalam pengungsian/penampungan sementara kondisi kejiwaan korban bencana harus mendapatkan penanganan serius. Pada fase pasca bencana pun masalah ini masih memerlukan penanganan hingga benar-benar pulih. Demikian pula setelah darurat selesai, titik berat penanganan pasca bencana/rehabilitasi umumnya masih berkisar pada aspek fisik/infrastruktur, sementara masalah sosial-ekonomi kurang diperhatikan dengan berbagai sebab.

g. Masalah-Masalah Sensitif

Terdapat tiga masalah sensitif yang perlu diperhatikan selama darurat yaitu pangan, tempat hunian/penampungan sementara, dan layanan kesehatan. Pangan diperlukan untuk bertahan hidup, tempat hunian/penampungan sementara diperlukan untuk keamanan dan keselamatan pribadi, perlindungan dari panas dan hujan, menguatkan daya tangkal terhadap gangguan kesehatan dan penyakit.

Untuk mengatasi masalah sebagaimana tersebut diatas, standar operasional prosedur (SOP) diperlukan untuk jenis bencana. Tiap jenis bencana memiliki karakteristik tersendiri sehingga penanganannya tidak bisa diberlakukan secara seragam/sama.

Menurut Chandra (2013,; 121) berdasarkan pengalaman keterlibatan langsung dalam penanganan bencana, menemukan beberapa persoalan. Bencana dan dinamika pengelolaannya menekankan betapa pentingnya menumbuhkembangkan nilai-nilai yang menyangkut kesejahteraan manusia. Bencana membawa pesan langsung yang tertuju pada kesadaran manusia. Meski alam tidak mempunyai bahasa verbal seperti halnya manusia tapi peristiwa bencana harusnya ditangkap dalam pengertian yang membaiknya sikap dan perilaku manusia. Alam juga mampu memiliki mekanisme dalam berkomunikasi. Bahkan alam pun terbukti memberikan tanda, sebagai salahsatu bentuk komunikasinya. Bisa jadi tanda-tanda itu tidak diindahkan oleh manusia sampai kemudian alampun terpaksa meminta perhatian manusia atas perlakuan yang diterima selama ini.

Mungkin bencana bisa juga berarti umpan balik akibat pengabaian manusia atas tanda-tanda yang telah disampaikannya jauh hari sebelumnya. Bukankah manusia sekarang tidak mau percaya begitu saja dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan tanpa logika-logika yang terukur, dan segala sesuatu harus jelas perhitungannya. Catatan prolematika komunikasi dalam konteks kebencanaan. Informasi telah menjadi bagian keseharian. Dalam konteks kebencanaan, informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat serius. Informasi memadukan semua pihak dalam mengambil skenario penyelamatan dan memberikan pertolongan. Sifat informasi diharapkan menggugah empaty dan simapty publik terhadap warga yang terkena bencana. Informasi menuntun inspirasi guna merancang sistem cara-cara mengorganisir diri, menghubungkan

satu kepedulian bersama yang lebih bertenaga, ia menjembatani antarpersonal dan institusional.

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Keberadaan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun 2008 sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Bantul No 05 tahun 2010 tentang penanggulangan Bencana serta Perda Kabupaten Bantul No 06 Tahun 2010 Tentang pembentukan organisasi BPBD, memiliki 3 (tiga) peran sebagai Koordinator, Komando dan Pelaksana dalam bidang Penanggulangan Bencana Baik pada Masa Pra bencana, Saat bencana Maupun Pasca bencana.

1. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2010 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten bantul Bertipe B sehingga untuk jabatan Kepala Badan adalah sekretaris daerah.

b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

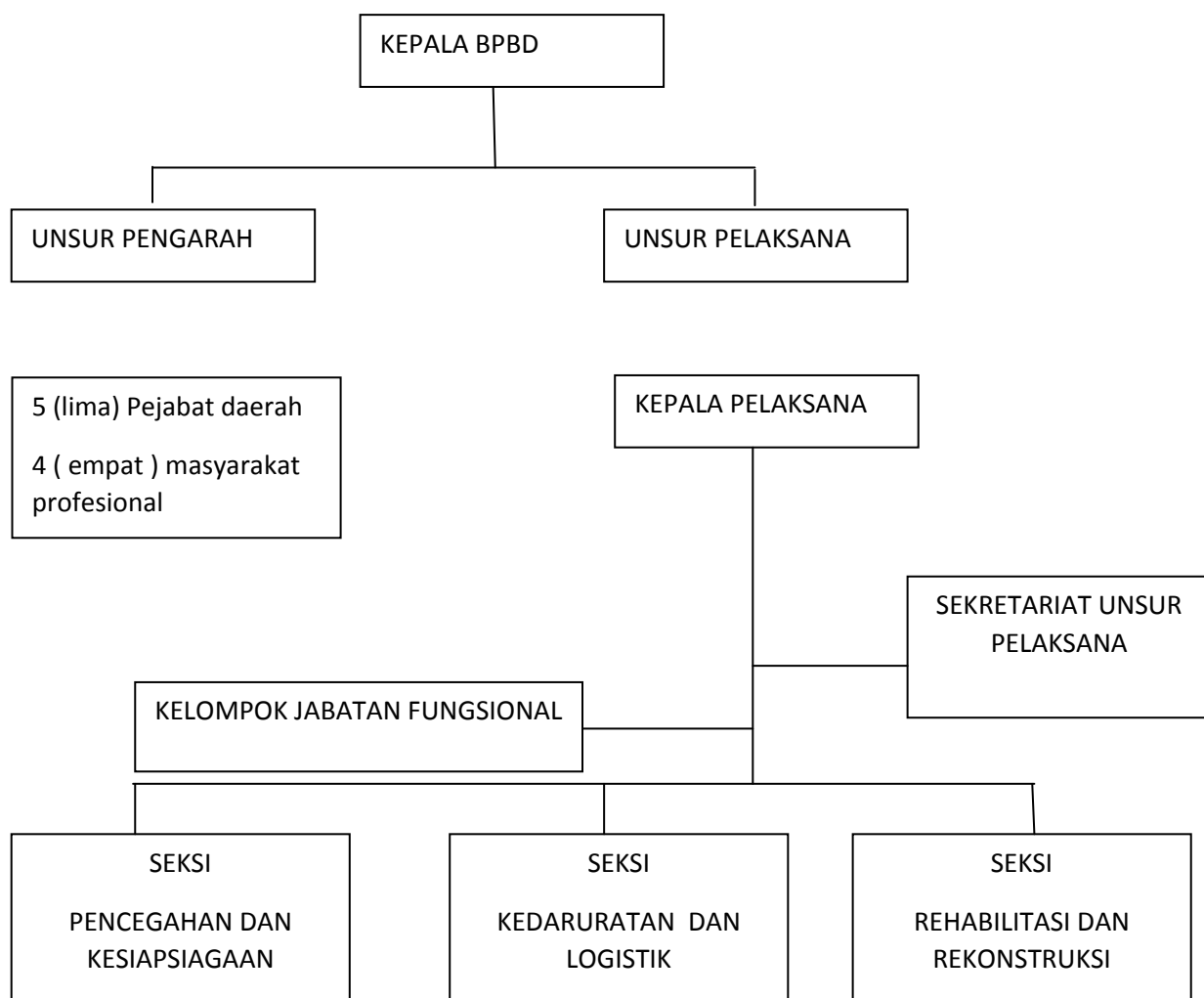
Di ketuai langsung oleh kepala badan dan beranggotakan sembilan orang dengan komposisi 5 (lima) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan 4 (empat) orang adalah masyarakat profesional.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada kepala badan, membantu kepala badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan penanggulangan bencana. Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas :

- 1) Kepala Pelaksana
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 4) Seksi Kedaruratan dan Logistik
- 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 6) Kelompok jabatan fungsional

Bagan Susunan Organisasi Badan penanggulangan Bencana daerah kabupaten Bantul berdasarkan Perda No 06 tahun 2010 :



**Gambar 6. Bagan Susunan Organisasi Badan penanggulangan
Bencana daerah kabupaten Bantul berdasarkan Perda No 06
tahun 2010**

Tabel 1. Sumber Daya manusia (SDM) BPBD PNS

| Jenis Pendidikan | | | | | | | Jml | Gol | | | | Jml |
|------------------|-----|-----|-------|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| SD | SMP | SMA | D1/D3 | S1 | S2 | S3 | | I | II | III | IV | |
| 5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | - | 31 | 9 | 6 | 14 | 2 | 31 |

Tabel 2. SDM BPBD Non PNS

| Jenis Pendidikan | | | | | | | Jml | Satuan Tugas | | | Jml |
|------------------|-----------|-----------|-------|----------|----|----|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| SD | SMP | SMA | D1/D3 | S1 | S2 | S3 | | SAR | PBK | PUSDALOPS | |
| 14 | 19 | 77 | - | 6 | - | - | 116 | 83 | 21 | 12 | 116 |

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Tugas pokok BPBD Kabupaten Bantul adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana. Adapun uraian tugas BPBD Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.:

- a. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris Pelaksana, mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Sekretaris pelaksana juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD.

- b. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD.
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang undangan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
 - e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana pada pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dan.

- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Seksi kedaruratan dan logistik juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik, dan
 - e. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas membantu kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dan ,
 - d. Pemantauan evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Sebagian besar anggota Satgas adalah non-ASN atau Tenaga Honorer yang bertugas 24 jam 7 hari secara bergilir (shift). Kiprah para anggota Satgas ini sangat besar peranannya dalam mengatasi kondisi kurangnya personil dari kalangan ASN. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana. Permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh BPBD Bantul saat ini tidak berdampak serius terhadap capaian visi dan misinya.

3. Rencana Strategis BPBD (Renstra BPBD)

Perencanaan jangka panjang yang sangat di butuhkan oleh sebuah lembaga yang merupakan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan yang akan di lakukan oleh sebuah lembaga. Selain itu renstra juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan.

Renstra BPBD kabupaten Bantul menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang pemerintah untuk mengurangi resiko bencana. Perencanaan strategis BPBD adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada kurun waktu 2011 – 2015. Dimaksudkan pula untuk memberikan landasan kebijaksanaan dalam operasional bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sehari - hari, disamping itu juga di maksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi, dan seimbang dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaikbaiknya untuk mencapai tujuan. Fungsi Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

A. Visi dan Misi BPBD

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (

BPBD) tahun 2011 – 2015 adalah : “Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana”.

Dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya di jabarkan dalam upaya - upaya yang dirumuskan dalam misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Melindungi masyarakat kabupaten Bantul dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- 2) Membangun sistem Penanggulangan bencana yang handal.
- 3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. Tujuan dan Sasaran BPBD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal hal yang perlu di lakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah :

- 1) Memadukan Upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah kabupaten Bantul

- 2) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana melalui usaha pemberian informasi dan pengetahuan, pendidikan pelatihan peningkatan ketrampilan dan lain lain.
- 3) Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat menentukan tingkat bencana penyelamatan, dan evakuasi korban penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana.
- 4) Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi budaya dan lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan infrastruktur fasilitas umum / sosial yang rusak akibat bencana.
- 5) Mengalokasikan dan menyediakan dana untuk penanggulangan bencana secara memadai dalam setiap tahapan penyelenggaraan

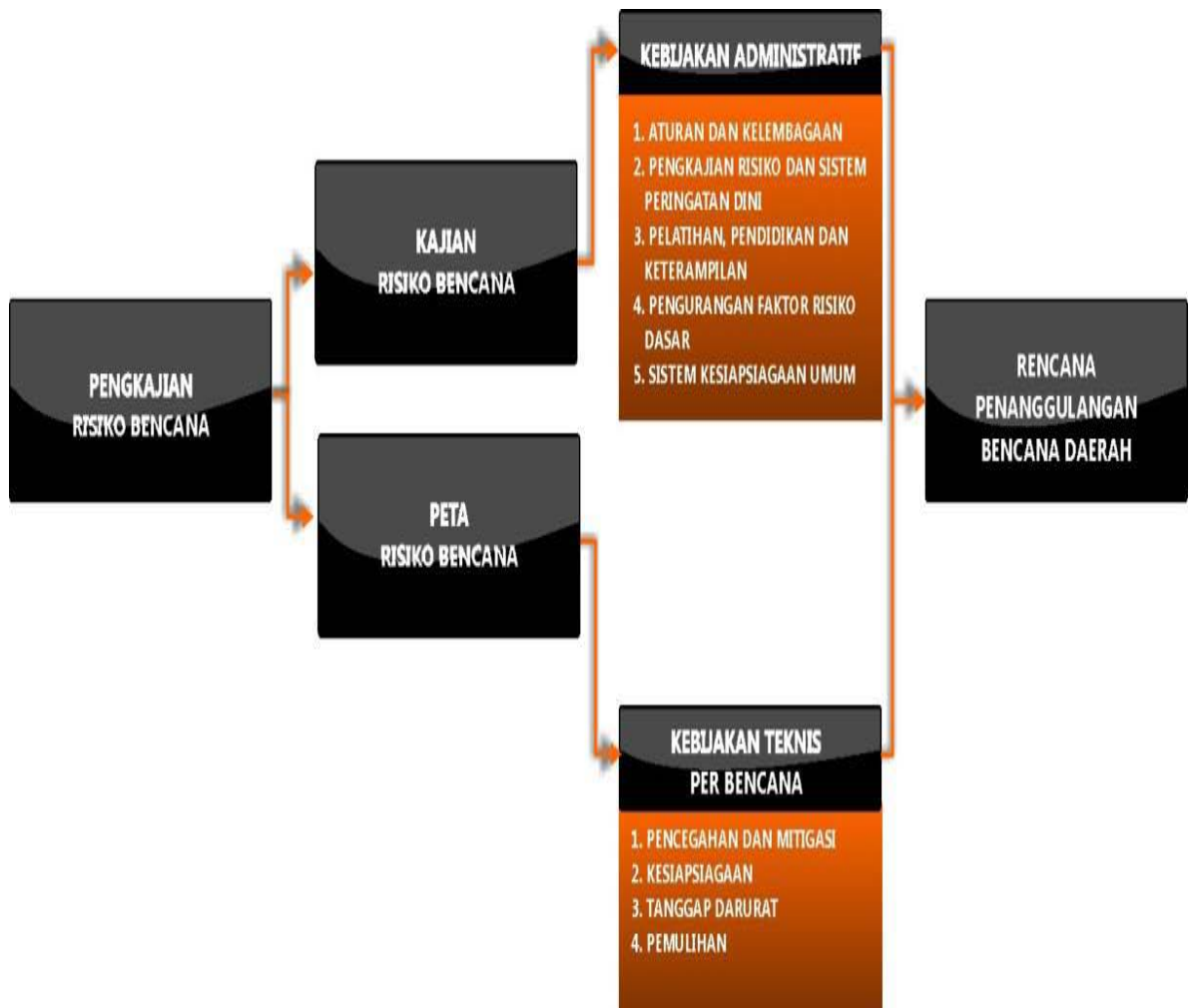
4. Strategi dan Kebijakan BPBD

Rumusan strategi merupakan pernyataan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan di capai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib di patuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang di pilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah diterapkn maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan, sasaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul sesuai dengan Renstra BPBD 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur BPBD yang memadai dalam melaksanakan Tupoksinya
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan staff BPBD, masyarakat, stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan bencana
- 3) Program dan kegiatan Pencegahan dan kesiapsiagaan
- 4) Program dan kegiatan kedaruratan dan logistik
- 5) membentuk team reaksi cepat dalam upaya kaji cepat penanggulangan bencana
- 6) program kerja serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- 7) meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Secara umum terdapat enam strategi penanggulangan bencana yang dibagi menjadi Strategi Generik dan Strategi Untuk Setiap Bencana. Strategi Generik merupakan strategi yang berlaku untuk seluruh bencana, terdiri dari Perkuatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu, Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan Strategi Untuk Setiap Bencana terdiri dari Perlindungan Masyarakat dari Bencana dan Penanganan Bencana. Berikut adalah skema penyusunan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana:



Gambar 7. Skema Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana

Dalam menyusun kebijakan ini, BPBD perlu menyusun suatu program penyusunan kerangka legal tentang mekanisme dan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menyediakan dana siap pakai untuk operasi tanggap darurat bencana. Penyusunan kerangka legal ini dilakukan dengan menyusun aturan tentang mekanisme partisipasi dan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menyusun aturan tentang mekanisme partisipasi dan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana. Dari hal ini diharapkan tercapainya suatu sasaran yaitu adanya aturan daerah tentang peran dan keterlibatan lembaga usaha dan lembaga internasional dan pembagian peran, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah Kabupaten Bantul, masyarakat dan institusi non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan untuk program penyediaan dana siap pakai untuk operasi tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan menyusun mekanisme pengalokasian, pengelolaan dan pemenuhan anggaran penanganan darurat bencana. Penyusunan ini diharapkan mencapai suatu sasaran adanya aturan daerah tentang pengalokasian, pengelolaan dan pemenuhan anggaran penanganan darurat.

Pada strategi penelitian, pendidikan, dan pelatihan difokuskan dengan Menerapkan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana secara terencana. Pada strategi ini difokuskan pada perkuatan kapasitas daerah melalui penerapan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana. Untuk mewujudkan kebijakan ini, pemerintah perlu mendayagunakan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur dengan melibatkan perguruan tinggi, peneliti internal dan pegawai pemerintah untuk penyelenggaraan riset kebencanaan. Dengan pendayagunaan hasil riset ini diharapkan mampu membangun budaya siaga bencana berbasis teknologi dan keilmuan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala para peneliti dan pemangku kebijakan di daerah. Hal ini membuat hasil riset kebencanaan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana untuk meningkatkan efektifitas serta optimalitas penanggulangan bencana daerah.

5. Sejarah Kebencanaan di Kabupaten Bantul

Berdasarkan catatan kejadian bencana oleh Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan BPBD Kabupaten Bantul teridentifikasi 6 (enam) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bantul. Bencana yang pernah terjadi ini berpotensi terjadi kembali di Kabupaten Bantul jika tidak ada penanganan yang serius terhadap potensi bencana. Untuk lebih jelas, dapat dilihat sejarah kejadian bencana di Kabupaten Bantul tahun 1815-2011 pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 1815-2011

| Kejadian | Jumlah kejadian | Meninggal | Luka-luka | Mengungsi | Rumah rusak berat | Rumah rusak ringan |
|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Banjir | 9 | 1 | - | - | 6 | - |
| Cuaca Ekstrim | 4 | 5 | 12 | - | - | - |
| Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 1 | - | - | - | - | 29 |
| Gempa Bumi | 4 | 4.143 | 12.051 | 802.804 | 78.622 | 69.918 |
| Kekeringan | 5 | - | - | - | - | - |
| Tanah Longsor | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Total | 24 | 4.150 | 12.064 | 802.804 | 78.622 | 69.918 |

(Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2012)

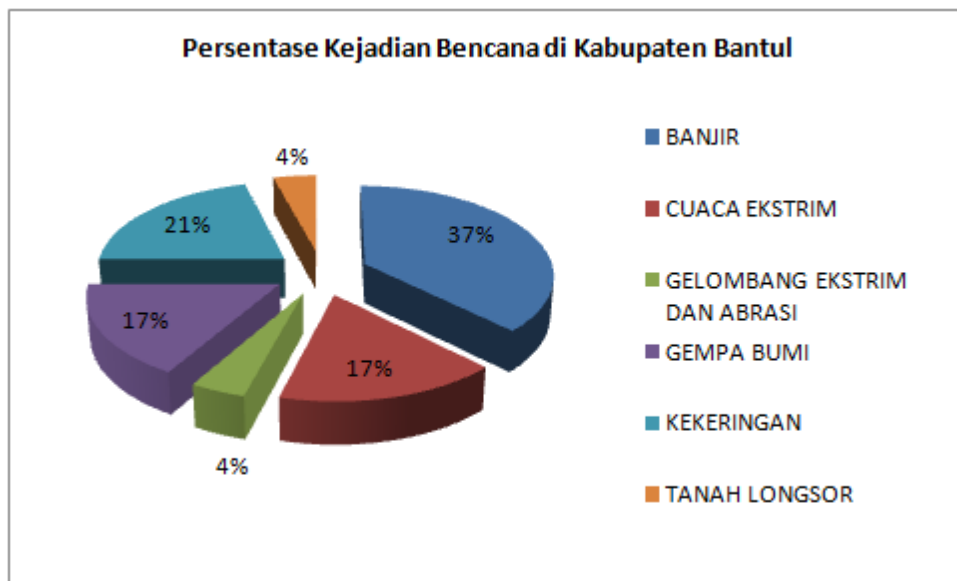
Berdasarkan tabel tersebut, kejadian bencana di Kabupaten Bantul dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Banjir tahun 2010 dengan 2 kali kejadian menyebabkan 1 korban jiwa meninggal. Tahun 2003 menyebabkan 6 rumah rusak berat. Selain itu

banjir juga terjadi tahun 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, tetapi tidak terjadi kerugian dan kerusakan.

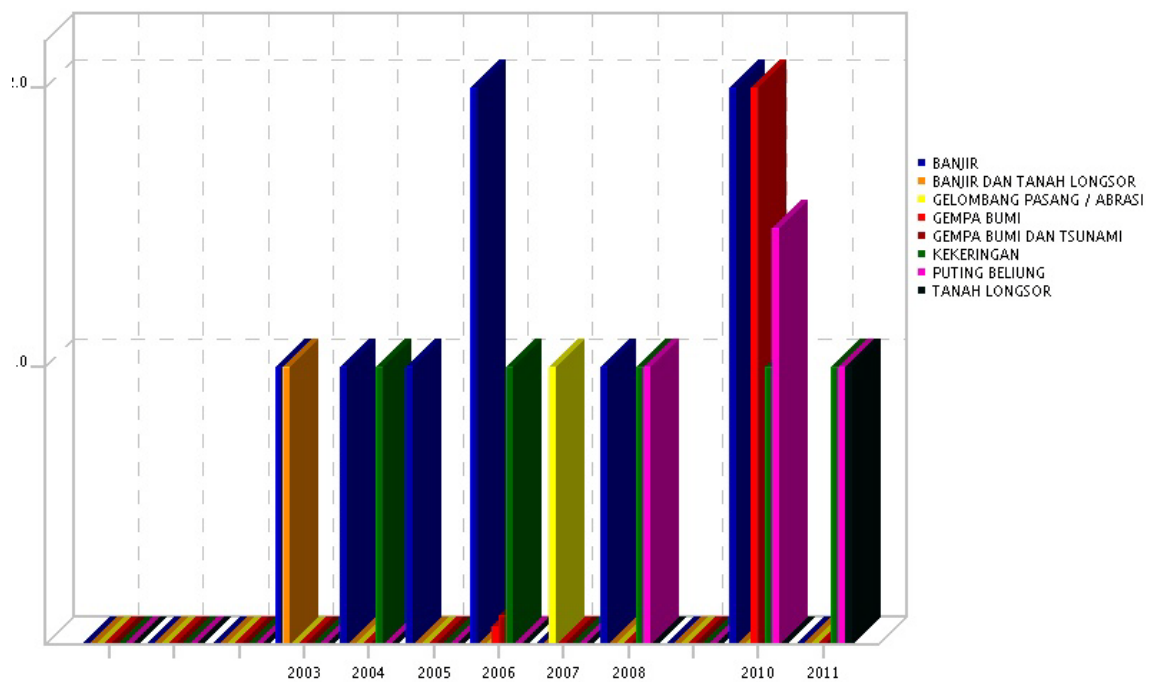
- b. Cuaca Ekstrim tahun 2008, 2010, dan 2011 terjadi 4 kali kejadian menyebabkan 5 korban jiwa meninggal, 12 jiwa luka-luka.
- c. Gelombang ekstrim dan abrasi tahun 2007 dengan 1 kali kejadian dan tidak mengakibatkan korban jiwa, tetapi mengakibatkan 29 rumah rusak ringan.
- d. Gempabumi tahun 2006 sebanyak 2 kali kejadian menyebabkan 4.143 korban jiwa meninggal, 12.029 luka-luka, 802.804 mengungsi, 78.622 rumah rusak berat, dan 69.818 rumah rusak ringan.
- e. Kekeringan terjadi pada tahun 2004, 2006, 2008, 2010, 2011 dengan total 5 kali. Tidak menimbulkan dampak yang berarti di Kabupaten Bantul, baik korban jiwa ataupun kerugian fisik.
- f. Tanah Longsor terjadi 1 kali kejadian pada tahun 2011 menyebabkan 1 korban jiwa meninggal dan 1 luka-luka.

Catatan data bencana dari tahun 1815-2011 terdapat 24 jumlah kejadian bencana. Banjir 9 kejadian, cuaca ekstrim 4 kejadian, gelombang ekstrim dan abrasi 1 kejadian, gempa bumi 4 kejadian, kekeringan 5 kejadian dan tanah longsor 1 kejadian. Di antara semua kejadian, bencana banjir paling sering terjadi dengan total kejadian 9 kali. Sedangkan bencana paling parah adalah gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Bencana ini juga menyebabkan kerugian fisik berupa kerusakan rumah dan bangunan-bangunan lain. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Bantul bisa dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa kejadian paling sering adalah banjir 9 kejadian (37%), selanjutnya kekeringan 5 kejadian (21%), gempa bumi dan cuaca ekstrim 4 kejadian (17%), tanah longsor dan gelombang ekstrim dan abrasi 1 kejadian (4%). Dari jumlah kejadian dapat diketahui analisa kecenderungan dari setiap jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul. Data kejadian bencana di Kabupaten Bantul menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian bencana secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9. Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2000-2011

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia 1815-2011, serta ditambah dengan hasil kajian bencana yang berpotensi maka bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bantul yang termasuk dalam kategori bencana yang disebabkan oleh :

1. Bencana Geologi meliputi: Gempa Bumi serta Tsunami.
2. Bencana Hidrometeorologi meliputi: Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kekeringan, Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Bencana Biologi meliputi : Epidemii dan Wabah Penyakit.